

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **1.1 Latar Belakang**

Di dalam *Statement of Financial Accounting Concept* (SFAC) No. 1, dikatakan bahwa laporan keuangan harus menyajikan informasi yang berguna untuk investor dan calon investor, kreditur dan pengguna lain dalam pengambilan keputusan investasi, kredit, dan keputusan lain yang serupa secara rasional.

Tujuan umum laporan keuangan menurut PSAK No. 1 paragraf 05 (IAI, 2007: 2) yaitu, memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja, dan arus kas perusahaan yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam rangka membuat keputusan-keputusan ekonomi serta menunjukkan pertanggungjawaban (*stewardship*) manajemen atas penggunaan sumber-sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Laporan keuangan diharapkan dapat menyediakan informasi mengenai kinerja keuangan perusahaan terhadap pihak yang membutuhkan.

Dalam menjalankan kegiatan operasinya, suatu perusahaan secara periodik menyiapkan laporan keuangan untuk pihak-pihak yang berkepentingan seperti pemegang saham, investor, dan pemerintah. Laporan keuangan berfungsi sebagai sumber informasi mengenai kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi pemakai informasi akuntansi dalam pengambilan keputusan. Menurut Baridwan (2004: 17), laporan keuangan merupakan ringkasan dari suatu proses pencatatan, merupakan suatu ringkasan dari transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama tahun buku yang

bersangkutan. Chariri dan Ghozali (2007) menyatakan bahwa salah satu tujuan pelaporan keuangan adalah yang memberikan informasi keuangan yang dapat menunjukkan prestasi perusahaan dalam menghasilkan laba (*earning per share*). Informasi keuangan yang dapat menunjukkan prestasi perusahaan dalam menghasilkan laba adalah laporan laba rugi. Menurut Kieso (2005: 149) laporan laba rugi (*income statement*) adalah laporan yang mengukur keberhasilan operasi perusahaan selama periode waktu tertentu, menyediakan informasi yang diperlukan oleh para investor dan kreditor untuk memprediksikan jumlah, penetapan waktu, dan ketidakpastian dari arus kas masa depan. Informasi tentang kinerja suatu perusahaan, terutama tentang profitabilitas dibutuhkan untuk mengambil keputusan oleh suatu perusahaan di masa yang akan datang. Akan tetapi, laba yang dihasilkan dalam laporan laba rugi seringkali dipengaruhi oleh metode akuntansi yang digunakan. Informasi tersebut juga seringkali digunakan untuk memperkirakan kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan kas dan aktiva sehingga laba yang tinggi belum tentu mencerminkan kas yang besar.

Perusahaan manufaktur merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pembuatan produk. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) terdiri dari tiga sektor yaitu sektor industri dasar dan kimia, sektor aneka industri dan sektor industri barang konsumsi. Perusahaan makanan dan minuman merupakan salah satu yang termasuk ke dalam sektor industri barang konsumsi. Sektor ini merupakan salah satu sektor yang dapat bertahan di tengah kondisi perekonomian Indonesia dan perusahaan *food and beverages* merupakan salah satu jenis perusahaan yang cenderung stabil dan tidak

terpengaruh secara signifikan oleh dampak krisis global. Walaupun terjadi krisis ekonomi, kelancaran produksi industri *food and beverages* masih terjamin karena dalam kondisi apapun konsumen tetap membutuhkan produk makanan dan minuman sebagai kebutuhan dasar. Hal ini menyebabkan banyak perusahaan ingin memasuki sektor ini, sehingga persaingan makin tajam. Untuk itu perusahaan harus memperkuat kondisi keuangan didalam perusahaan dengan cara mengelola struktur keuangan dengan baik.

Cerminan kinerja perusahaan adalah laba yang dapat dikelola secara efisien atau oportunistis. Secara efisien artinya dikelola untuk meningkatkan keefektifan informasi dalam mengkomunikasikan informasi pribadi, dan secara oportunistis artinya untuk meningkatkan laba sesuai dengan yang diinginkan dan menguntungkan pihak-pihak tertentu. Dalam menunjukkan prestasi perusahaan untuk menghasilkan laba, manajemen cenderung mengelola laba secara oportunistis dan melakukan manipulasi laporan keuangan agar terdapat laba yang memuaskan meskipun tidak sesuai dengan kondisi perusahaan yang sebenarnya. Untuk mencapai tujuan yang diinginkan perusahaan, pihak manajemen perusahaan dapat menentukan kebijakan penggunaan metode akuntansi dalam menyusun laporan keuangan.

Menurut *Statement of Financial Accounting Concept (SFAC) No. 1*, informasi laba merupakan perhatian utama untuk menaksir kinerja atau pertanggungjawaban manajemen. Selain itu informasi laba juga membantu pemilik atau pihak lain dalam menaksir *earnings power* perusahaan di masa yang akan datang. Manajer mempunyai kewajiban untuk memaksimalkan kepentingan

kesejahteraan para *stakeholders*, namun di sisi lain manajer juga mempunyai kepentingan untuk memaksimalkan kesejahteraan mereka sendiri. Penyatuan kepentingan pihak-pihak ini seringkali menimbulkan masalah-masalah yang disebut dengan masalah keagenan atau agensi konflik (Faisal, 2004).

Scott (2006) didalam bukunya yang berjudul “*Financial Accounting Theory*” menyatakan bahwa pilihan kebijakan akuntansi yang dilakukan manajer untuk tujuan spesifik disebut dengan manajemen laba. Adanya kecenderungan lebih memperhatikan laba ini disadari oleh manajemen yang kinerjanya diukur berdasarkan informasi laba tersebut, sehingga mendorong timbulnya perilaku menyimpang dari manajer, yaitu salah satunya adalah manajemen laba. Sedangkan menurut Belkaoui (2006: 74), manajemen laba (*earnings management*) yaitu suatu kemampuan untuk memanipulasi pilihan-pilihan yang tersedia dan mengambil pilihan yang tepat untuk dapat mencapai tingkat laba yang diharapkan.

Adapun dua metode yang biasanya digunakan dalam praktik manajemen laba, yaitu menggunakan metode manajemen laba akrual (*accrual earnings management*) dan manajemen laba riil (*real earnings management*). Manajemen laba akrual adalah suatu bentuk manipulasi laporan keuangan secara akrual yang digunakan untuk meningkatkan laba yang dilaporkan dengan cara memilih praktik bisnis normal yang dilakukan dengan tujuan utama untuk mencapai target laba tertentu (Roychowdhury, 2006). Manajemen laba riil didefinisikan sebagai manipulasi aktivitas riil yaitu penyimpangan dari aktivitas operasi normal perusahaan yang dimotivasi oleh keinginan manajemen untuk menyesatkan

*stakeholder* bahwa tujuan pelaporan keuangan tertentu telah dipenuhi melalui aktivitas operasi normal perusahaan (Roychowdhury, 2006).

Tindakan manajemen laba telah memunculkan beberapa kasus pelaporan akuntansi yang secara luas skandal tersebut diketahui, antara lain *Enron Merck*, *World Com* dan mayoritas perusahaan lain di Amerika Serikat (Cornett et al, 2006). AAER (*Accounting and Auditing Enforcement Releases*), suatu divisi di SEC (*Security and Exchange Commission*) pada tahun 2000 dalam Mulford dan Comiskey (2010). Sedangkan di Indonesia, manajemen laba merupakan tindakan kecurangan yang dilakukan oleh manajemen perusahaan, yang dapat merugikan investor, kreditur, serta pihak lain yang menggunakan informasi dalam laporan keuangan. Sebagaimana mestinya Investor dan kreditur adalah sumber dana eksternal yang perlu dilindungi dari tindak kecurangan yang dilakukan manajemen. Contoh kasus skandal yang terjadi di Indonesia sendiri adalah sebagai berikut PT. Kimia Farma Tbk. pada tahun 2002, PT. Indofarma Tbk. pada tahun 2004, PT. Indosat pada tahun 2003 dan 2004, dan PT. Kereta Api tahun 2005.

Oleh karena itu, diperlukan adanya suatu pengawasan terhadap manajemen di perusahaan agar terhindar terjadinya praktik manajemen laba. Pengawasan ini sangat penting karena kasus-kasus besar manajemen laba seperti kasus *Enron* dan *Worldcom* terbukti melibatkan manajemen perusahaan pada tingkat tertinggi (Muntoro, 2006). Pengawasan terhadap manajemen atau direksi pada perusahaan merupakan tugas dari dewan komisaris. Hal ini telah diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UU PT).

Dalam rangka pelaksanaan *good corporate governance*, Keputusan direksi PT. Bursa Efek Jakarta No : Kep-305/BEJ/07-2004 Tentang Peraturan Nomor 1-A mengenai pencatatan saham dan efek bersifat ekuitas selain saham diterbitkan oleh perusahaan tercatat, bahwa calon perusahaan tercatat baik yang akan mencatatkan saham di bursa wajib memenuhi persyaratan memiliki komisaris independen, komite audit, dan sekretaris. Hal ini didukung oleh Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No. Kep-643/BL/2012 peraturan nomor IX.I.5 tentang pembentukan dan pedoman pelaksanaan kerja komite audit, dalam peraturan tersebut yang dimaksud dengan komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris.

Keberadaan Komisaris Independen telah diatur Bursa Efek Jakarta melalui peraturan BEJ tanggal 1 Juli 2000. Dalam peraturan ini, persyaratan jumlah minimal Komisaris Independen adalah 30% dari seluruh anggota Dewan Komisaris.

Lemahnya pengawasan dari pihak independen dan terlalu besarnya kekuasaan eksekutif telah menjadi sebagian dari penyebab tumbangya perusahaan-perusahaan dunia seperti *Enron Corp.*, *WorldCom*, dan lain-lain. Selain itu lemahnya pengawasan terhadap manajemen juga diindikasikan sebagai salah satu penyebab krisis finansial di Asia, termasuk Indonesia. Oleh karena itu, pemberdayaan komisaris dengan cara memperkenalkan komisaris independen yang diharapkan akan menjadi penggerak GCG telah menjadi bagian dari reformasi kehidupan bisnis di Indonesia pasca krisis. Mengingat cukup beratnya

tugas komisaris dalam mengawasi jalannya perusahaan, maka komisaris dapat dibantu oleh beberapa komite audit yang ditentukan oleh dewan komisaris. Pembentukan komite tersebut bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dari kegiatan GCG di perusahaan. Pembentukan komite audit harus ditetapkan melalui surat keputusan (SK) dewan komisaris.

Menurut Achmad Daniri (2006), bagian penting dari reformasi *corporate governance* di Indonesia dan di berbagai negara adalah pemberdayaan fungsi pengawasan dewan komisaris termasuk penunjukkan komisaris independen dan pembentukan komite audit. Secara hukum, baik anggota dewan komisaris maupun direksi pada dasarnya didaulat harus independen. Menurut Achmad Daniri (2006), Peraturan mengenai keberadaan komisaris independen dan komite audit pada dasarnya mempunyai tujuan untuk memberdayakan fungsi pengawasan dewan komisaris menjadi lebih efektif. Jadi, penamaan komisaris independen sebenarnya hanya terkait dengan kualifikasi calon anggota dewan komisaris. Pengaturan berikutnya bahwa komisaris independen harus menjadi ketua komite audit dan ketua komite-komite lain yang memang membutuhkan sikap independen dari mereka (misalnya menjadi ketua komite nasional dan remunerasi, ataupun komite *good corporate governance*). Saat ini di Indonesia organ komite audit relatif masih baru. Pengalaman dalam mengembangkan komite ini berdasarkan praktik internasional terbaik belum lama. Sebagai komite yang dibentuk oleh dewan komisaris, mereka merupakan cerminan keaktifan, komitmen, dan profesionalisme dewan komisaris dan komisaris independen, dimana yang terakhir ini oleh perangkat peraturan yang ada diwajibkan untuk memimpin komite audit.

Dengan demikian, pemahaman mengenai bagaimana interaksi komisaris dan direksi dengan komite audit menjadi krusial bagi proses terwujudnya komite audit yang efektif dalam rangka penegakan *Good Corporate Governance* (GCG).

Penerapan *Good Corporate Governance* menjadi jawaban untuk mengurangi risiko praktik manajemen laba yang dapat dilakukan manajemen. Keberadaan komite audit disinyalir menjadi salah satu langkah pencegahan yang efektif dalam perusahaan berkenaan dengan penekanan manajemen laba. Selain fungsi tersebut, komite audit dapat menjadi wakil dari investor yang dapat mengawasi proses bisnis dalam perusahaan tersebut. Ketentuan mengenai keanggotaan komite audit juga diatur dalam Surat Edaran BAPEPAM No. SE-03/PM/2000 Tanggal 5 Mei 2000 dan Keputusan Direksi Bursa Efek Jakarta (BEJ) No. Kep-315/BEJ/06/2000. Dalam surat dan keputusan tersebut dinyatakan bahwa komite audit sekurang-kurangnya terdiri atas tiga orang anggota, seorang diantaranya merupakan komisaris independen yang sekaligus merangkap sebagai ketua komite audit, sedangkan anggota lainnya merupakan pihak eksternal yang independen, dimana setidaknya satu diantaranya memiliki kemampuan dibidang akuntansi dan/atau keuangan.

Menurut Muh. Arief Effendi (2009: 34), keberadaan komite audit diperusahaan publik sampai saat ini masih sekadar untuk memenuhi ketentuan pihak regulator (pemerintah) saja. Hal ini ditunjukkan dengan penunjukan anggota komite audit di perusahaan publik yang sebagian besar bukan didasarkan atas kompetensi dan kapabilitas yang memadai, namun lebih didasarkan pada kedekatan dengan dewan komisaris perusahaan. Dari aturan-aturan yang

dikeluarkan oleh Bapepam dan LK dan bursa efek tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa salah satu tujuan pembentukan komite audit adalah untuk meningkatkan fungsi pengawasan dewan komisaris sebagai salah satu struktur tata kelola. Peran, tujuan, dan manfaat komite audit bagi penegakan GCG perusahaan mengalir dari fungsi pengawasan dewan komisaris (Alijoyo et al, 2006). Faktor yang dianggap dapat mempengaruhi peran komite audit salah satunya adalah proporsi komisaris independen. Proporsi dewan komisaris yang independen dianggap akan sangat berpengaruh terhadap efektifitas komite audit yang terpilih karena anggota komite audit bertanggung jawab kepada dewan komisaris. Proporsi komisaris independen yang secara proporsional dalam struktur dewan komisaris dianggap menentukan tingkat independensi dewan komisaris. Komposisi dewan komisaris harus ditetapkan sedemikian rupa sehingga memungkinkan pengambilan keputusan dapat dilakukan secara efektif, tepat dan cepat serta dapat bertindak secara independen. Penelitian ini dilakukan untuk mengumpulkan, menganalisis, menyajikan peran dewan komisaris independen dan komite audit pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Selain penerapan *corporate governance*, dalam penelitian ini terdapat faktor lain yang mempengaruhi praktik manajemen laba yaitu ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan yang kecil dianggap lebih banyak melakukan praktik manajemen laba dari pada perusahaan besar. Hal ini dikarenakan perusahaan kecil cenderung ingin memperlihatkan kondisi perusahaan yang selalu berkinerja baik agar investor menanamkan modalnya pada perusahaan tersebut. Perusahaan yang besar lebih diperhatikan oleh masyarakat sehingga mereka akan lebih berhati-hati

dalam melakukan pelaporan keuangan, sehingga berdampak perusahaan tersebut melaporkan kondisinya lebih akurat (Nasution dan Setiawan, 2007).

Penelitian ini juga dimotivasi oleh penelitian Nasution dan Setiawan (2007) yang menghasilkan kesimpulan yang berbeda dengan penelitian Ujiyantho dan Pramuka (2007) untuk variabel ukuran dewan komisaris. Nasution dan Setiawan (2007) menemukan adanya hubungan yang positif antara manajemen laba dan ukuran dewan komisaris. Semakin kecil ukuran dewan komisaris, maka semakin efektif peran dan fungsinya. Sehingga semakin kecil pula kemungkinan terjadinya manajemen laba. Sedangkan Ujiyantho dan Pramuka (2007) memperoleh hasil bahwa ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap manajemen laba.

Dalton et al. (1999) dalam Rahmat et al. (2008) menemukan bahwa komite audit menjadi tidak efektif jika ukurannya terlalu kecil atau terlalu besar. Ukuran komite audit yang tepat akan memungkinkan anggota untuk menggunakan pengalaman dan keahlian mereka bagi kepentingan terbaik *stakeholder*. Lin (2006) membuktikan bahwa semakin besar ukuran komite audit maka kualitas pelaporan keuangan semakin terjamin. Sehingga besarnya ukuran komite audit dapat meminimalisasi terjadinya manajemen laba.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian-penelitian sebelumnya yang menguji pengaruh variabel independen (ukuran dewan komisaris, komposisi komisaris independen, jumlah komite audit, dan ukuran perusahaan) terhadap variabel dependen (manajemen laba yang diproksikan dengan *discretionary accruals*) baik secara simultan maupun secara parsial. Perbedaannya terletak pada sampel dan periode penelitian. Penelitian dilakukan terhadap perusahaan

manufaktur sektor *food and beverage* yang tercatat di BEI dalam periode 2012-2014.

Terjadinya kasus-kasus manajemen laba di Indonesia dan luar negeri membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang penerapan mekanisme *good corporate governance* dan hubungannya dengan manajemen laba. Adapun judul dari penelitian ini adalah **“Pengaruh Ukuran dan Komposisi Dewan Komisaris, Jumlah Komite Audit dan Ukuran Perusahaan Terhadap Manajemen Laba (Studi Kasus pada Perusahaan *Food and Beverages* yang Tercatat di Bursa Efek Indonesia Tahun 2010-2014)”**

## **1.2 Identifikasi dan Pembatasan Masalah**

### **1. Identifikasi Masalah**

- 1) Beberapa penelitian menunjukkan pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap kinerja perusahaan memiliki hasil yang beragam. Besar kecilnya ukuran dewan komisaris sangat berpengaruh terhadap manajemen laba.
- 2) Komposisi dewan komisaris ternyata belum mampu mengurangi tindak manajemen laba di perusahaan yang disebabkan oleh penempatan atau penambahan anggota komisaris independen dimungkinkan hanya sekedar memenuhi ketentuan formal.
- 3) Ukuran perusahaan adalah salah satu faktor dalam praktik manajemen laba. Ukuran perusahaan yang kecil dianggap lebih banyak melakukan praktik manajemen laba dari pada perusahaan besar.

## 2. Pembatasan Masalah

- 1) Sampel penelitian adalah perusahaan manufaktur karena variasi asset yang tinggi sehingga mudah dilakukan treatment untuk manajemen laba.
- 2) Periode waktu dalam penelitian ini adalah tahun 2010 – 2014 atas 13 perusahaan manufaktur sektor *food and beverages* yang telah melaporkan laporan keuangannya di BEI secara berkala.
- 3) Variabel independen dalam penelitian ini adalah ukuran dewan komisaris, komposisi dewan komisaris, jumlah komite audit dan ukuran perusahaan. Sedangkan variabel dependennya adalah manajemen laba.

### 1.3 Perumusan Masalah

Masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap manajemen laba pada perusahaan *food and beverages* yang tercatat di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2014 ?
2. Apakah terdapat pengaruh komposisi dewan komisaris independen terhadap manajemen laba pada perusahaan *food and beverages* yang tercatat di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2014 ?
3. Apakah terdapat pengaruh jumlah komite audit terhadap manajemen laba pada perusahaan *food and beverages* yang tercatat di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2014 ?
4. Apakah terdapat pengaruh ukuran perusahaan terhadap manajemen laba pada perusahaan *food and beverages* yang tercatat di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2014 ?

5. Apakah terdapat pengaruh ukuran dewan komisaris, komposisi dewan komisaris, jumlah komite audit dan ukuran perusahaan terhadap manajemen laba pada perusahaan *food and beverages* yang tercatat di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2014 ?

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan yang dapat dinyatakan sebagai berikut ini :

1. Untuk mengetahui pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap manajemen laba pada perusahaan *food and beverages* yang tercatat di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2014.
2. Untuk mengetahui pengaruh komposisi komisaris independen terhadap manajemen laba pada perusahaan *food and beverages* yang tercatat di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2014.
3. Untuk mengetahui pengaruh komposisi komite audit terhadap manajemen laba pada perusahaan *food and beverages* yang tercatat di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2014.
4. Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap manajemen laba pada perusahaan *food and beverages* yang tercatat di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2014.

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dan kontribusi sebagai berikut :

1. Bagi Penulis

Penelitian ini hendaknya dapat memberikan kontribusi atau tambahan referensi pada pengembangan teori, terutama kajian akuntansi keuangan mengenai *agency theory* dan mengenai tata kelola perusahaan yang baik dengan mengukur karakteristik dewan komisaris di perusahaan dan pengaruhnya terhadap praktik manajemen laba.

2. Bagi Akademisi

Penelitian ini memberikan informasi dan memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan terutama penelitian yang berkaitan ukuran dewan komisaris dan komite audit, terutama dibidang manajemen laba.

3. Bagi Perusahaan

Penelitian ini dapat menjadi masukan sekaligus acuan dalam mencermati praktik manajemen laba yang dianggap berguna bagi pimpinan perusahaan.

4. Bagi Penelitian Mendatang

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian-penelitian mendatang terutama penelitian yang terkait dengan *good corporate governance* maupun praktik manajemen laba.